

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA SUNGAI MEMPURA DI KABUPATEN SIAK

YENDRI NAZIR

### ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan berdasarkan tiga indikator yang menjadi tinjauan penulis adalah pada indikator penataan kawasan yang menjadi item penilaianya adalah pembagian fungsi kawasan, peruntukan lahan, pembuatan sirkulasi dan penghubung serta pengembangan fasilitas umum dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik atau pada hasil penelitian yang didasari pada konsep awal dapat dikatakan gagal dalam pencapaian target yang diinginkan. Hal ini juga didasari pada faktor pendukung dan penghambat. Sebagai faktor pendukung adalah adanya kebijakan pemerintah berdasar RPJMD 2006-2011 dan juga potensi wilayah dan sumber daya alam. Kemudian yang menjadi penghambat adalah keterbatasan keuangan daerah, kurangnya dukungan aparatur dan birokrasi pemerintah, kendala struktural dan kultural, keterbatasan sosial ekonomi dan keterbatasan SDM.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pemberdayaan Lokal, Kesejahteraan Rakyat.

Pembangunan kawasan agrowisata secara ekonomis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomis masyarakat Mempura khususnya. Disisi yang lain dapat menjadi ancaman sosial bilamana perubahan-perubahan yang terjadi tidak dibarengi dengan kesiapan wilayah setempat khususnya sumber daya manusianya. Dengan semua potensi yang ada Pemerintah Daerah Siak bercita-cita menjadikan Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukungan oleh Agribisnis, Agrowisata dan Pariwisata Yang Maju Dan Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Sejahtera Tahun 2025, Seperti tertuang dalam Visi Siak 2025. Berhubungan dengan hal tersebut pengembangan suatu kawasan termasuk bidang kepariwisataan perlu diperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek sosioekonomi penduduk lokal. Hal ini akan dipandang penting karena kepariwisataan akan memberikan dampak terhadap penduduk setempat, baik positif atau negatif.

Sebagai dasar pembentukan Tim Binamulia yang dimaksud adalah dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan sektor agrowisata agar lebih tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu ditingkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak. Kemudian untuk mewujudkan hal yang dimaksud diatas, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak khususnya dibidang agrowisata disamping keterpaduan serta koordinasi yang mantap dari berbagai pihak pada Dinas Instansi terkait baik sektoral maupun lintas sektoral sehingga untuk memenuhi kegiatan yang dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Binamulia Agrowisata Sungai Mempura.

Adapun maksud program Kegiatan Pengembangan Kawasan Agrowisata adalah untuk membentuk, menyelaraskan dan mengendalikan pembangunan fisik, budaya dan kegiatan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dikawasan mempura sebagai kawasan agrowisata. Sedangkan tujuannya adalah : (1) Membuat konsep awal penataan kawasan untuk pengembangan kawasan agrowisata yang memiliki daya saing, daya tarik investasi dan tetap memiliki karakter budaya melayu. (2) Menata kawasan dengan mempertimbangkan aspek arsitektural, fungsional dan pola penataan lingkungan yang sesuai dengan kebijakan kawasan. (3) Mengimplementasikan konsep penataan kawasan dalam perencanaan tapak, tata letak, sirkulasi, lensekap dan pola lingkungan.

Aflikasi kebijakan ini melalui proyek – proyek pada pelaksanaan tahap awal tersebut adalah pembangunan Turap Talud (Tumpukan Batu) dimakam Tengku Buang Asmara dengan anggaran 2009 sebesar Rp. 969.573.000 selama 150 hari yakni masa kerja 2 Juli 2009- 28 november 2009 oleh CV. Siak Pratama Eingenering dan yang kedua adalah CV. Karya Akbar

dengan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dan kantor Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura dengan anggaran 2009 yaitu Rp. 623.150.000 selama 120 hari kerja pada 5 Agustus 2009 – 2 Desember 2009.

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas maka mengingat program kegiatan ini berlangsung hingga lima tahun hingga sempurna maka penulis membatasi permasalahan yakni pada kegiatan 2 tahun tahap pertama tahun 2009 yang mengalami berbagai kendala. Berdasarkan hasil prasurvei dilapangan pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura tahun 2009 maka penulis melihat berbagai fenomena terhadap pelaksanaan tahap awal pengembangan itu terlihat jelas pada masalah yang terjadi antara lain : (1) Belum tercapainya beberapa program khususnya pada tahap awal pengembangan Kawasan Ekowisata yang dilakukan oleh Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura. (2) Kurangnya koordinasi dan komunikasi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terlihat pada gagalnya proyek yang berlangsung pada tahap awal sehingga terjadi pemborosan anggaran pemerintah daerah. (3) Belum siap serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program kegiatan pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura, terlihat pada kurangnya sosialisasi Tim kepada masyarakat.

Masih belum jelasnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura dalam usaha pembangunan dan pemberdayaan untuk mencapai Visi pemerintah Kabupaten Siak maka penulis mencoba memaparkan permasalahan yang penulis bahas sebagai berikut : “Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak ? ”

Adapun tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak. (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak.

Salah satu implikasi nyata dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut adalah adanya reorientasi penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan aspirasi masyarakat didaerah. Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berikut uraian tentang tugas – tugas pemerintahan yang dikemukakan oleh Santosa (1993 : 21) antara lain : (1) Melaksanakan pembangunan. Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yakni masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya adalah subjek pembangunan atau manusia pembangun hakekatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan dan manajemen pemerintahan. (2) Pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pihak kecamatan sebagai rangkaian organisasi pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (3) Memberikan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Nugroho (2003 : 36) Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Suprianto (1988 : 99) kelancaran pelaksanaan tugas administrasi atau manajemen adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan secara tepat dan baik dan tugas tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maka dapat dilihat : (1) Penguasaan tugas, (2) Kemampuan bekerjasama, (3) Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, (4) Pemberian hasil laporan yang tepat dan benar

Selanjutnya untuk mencegah kemungkinan dari gejala - gejala kurangnya kordinasi, untuk itu perlu adanya koordinasi, koordinasi dalam penyelenggaraan organisasi menurut Westra (1980 :55), hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini : (1) Diadakan pembagian kerja yang jelas dalam organisasi atau program termaksud. (2) Semangat kerja yang besar diantara para pejabat atau pegawai hendaklah dibina terus menerus. (3) Fasilitas komunikasi dan tata hubungan yang cukup bagi semua pihak dalam organisasi maupun luar usaha kerja sama semua itu di pupuk. (4) Koordinasi hendaklah disiapkan sejak tahapan –tahapan permulaan kegiatan atau program yang bersangkutan dengan perencanaan –perencanaan yang jelas dan kemudian dipertahankan sebagai proses yang terus menerus.

Pengembangan industri pariwisata dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani karena dengan adanya kesempatan kerja disektor Non pertanian disamping itu juga dapat meningkatkan sikap masyarakat petani terhadap keterkaitan pengembangan industri pariwisata.

Menurut Pitana (2010 : 25) Berbagai jenis objek wisata yang dikembangkan harus berdasarkan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek berikut : (1) Memiliki kekhasan yang menjadikan berbeda dari objek wisata lain, (2) Memiliki keterpaduan dengan kondisi alam kawasan, (3) Melayani wisatawan dari berbagai kelompok umur, (4) Menampung berbagai kegiatan wisata

Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan, dan lingkungan sosial masyarakat dinamis, Desa sebagai sub sistem pemerintahan nasional, memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Hal ini disadari oleh pemerintah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan. Untuk itu berbagai kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan desa menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang. (Wasistiono, 2007 : 85).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat pelaksanaan program pengembangan agrowisata di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta – fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari responden yang mewakili seluruh populasi.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan geografis Kecamatan yang dekat dengan Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, serta lokasi yang strategis dengan Pusat Kota Siak.

Sampel dalam penelitian Kualitatif dinamakan responden, atau sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman atau guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Keadaan responden atau narasumber ataupun sebagai Key Informan penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak terdiri atas : Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak (Ketua Dewan Eksekutif, Anggota Teknis dan Anggota Sekretariat), Camat Mempura, Kepala Desa Sungai Mempura, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas PU Siak, Kepala Dinas pertanian, anggota DPRD Komisi III, RT 1 dan 2 Desa Mempura dan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, responden dari masyarakat 10 KK, untuk RT 2 orang pada Desa Mempura. Keseluruhan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik penarikan Purposive Sampling Dengan pertimbangan bahwa jumlah responden yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian (Kompeten).

Sedangkan untuk Key Informan (Informasi Kunci) untuk mendapatkan jawaban yang lebih menjanjikan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan responden yakni Ketua Tim Binamulia (Dewan Eksekutif) 1 orang, anggota Teknis 1 orang, dan anggota Sekretariat 1 orang, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Anggota DPRD Komisi III 1 orang, Kepala Dinas Pariwisata Siak, Kepala Dinas PU Siak, Kepala Dinas Pertanian Siak, Camat Mempura Dan Kepala Desa. Jadi, dari keseluruhan populasi yang dijadikan sampel (Responden) menggunakan teknik “Purposive Sampling”.

Pada prinsipnya analisa data merupakan proses pengolahan data dan menyusun data secara sistematis agar dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yakni merupakan metode pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara murni dengan responden dari hasil wawancara data tersebut dikumpulkan dan diolah serta dianalisa sesuai dengan teori yang digunakan atau dalam bentuk penejelasan yang mendalam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis tentang masalah penelitian ini, yakni pelaksanaan Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak dalam hal ini peneliti memilih anggota tim yang telah ditetapkan sebagai analisis yakni ketua Tim, tim teknis serta anggota sekretariat yang dianggap paling memahami pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian juga instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Dinas pertanian, Sekda dan anggota DPRD komisi III yang mengetahui pelaksanaan perencanaan kegiatan Kabupaten tersebut.

Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Mempura berdasarkan SK Bupati No : 1 /HK/KPTS/2009 akan ditinjau dari beberapa indikator yaitu Melakukan penataaan dan penyempurnaan tataruang agrowisata, Kegiatan program pengembangan Histourism Dan Religio dan Memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah.

Keseluruhan indikator penelitian tersebut didapatkan jawabannya berdasarkan wawancara bebas terpimpin secara mendalam dengan responden, sehingga didapat apakah indikator yang telah ditetapkan tersebut dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Siak.

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara bebas terpimpin dengan responden yang telah ditetapkan dan analisis yang dilakukan peneliti dari responden yang diambil sesuai kebutuhan penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

### a. Melakukan Penataan dan Penyempurnaan Tataruang Agrowisata

Dalam melakukan penataan dan penyempurnaan tata ruang agrowisata Mempura ini tentu saja dalam upaya pelaksanaan pengembangan ini tidak bisa dilaksanakan oleh suatu organisasi atau institusi saja, pengembangan agrowisata harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan agrowisata. Semua pihak yang terkait harus memiliki kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan. Jadi, sebelum proyek pengembangan dimulai harus terlebih dahulu diidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap agrowisata. Kemudian

merumuskan Visi dan Misi pengembangan dan untuk selanjutnya menetapkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dari pihak Stakeholder setelah itu baru bisa dilaksanakan kegiatan pengembangan terhadap penataan dan penyempurnaan tataruang agrowisata.

Dalam konsep penataan dan penyempurnaan tata ruang itu sendiri dengan maksud menyelaraskan dan mengendalikan pembangunan fisik, budaya dan kegiatan pariwisata serta pembedayaan masyarakat dikawasan tersebut sehingga diharapkan menjadi suatu destinasi wisata baru yang menjadi perhatian dan tujuan bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan cara ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan menjaga lingkungan alami dikawasan tersebut.

### 1. Pembagian Fungsi Kawasan

Kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata ini memiliki wilayah cakupan yang sangat luas dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan tahap persiapan dengan melakukan survey kawasan yang lebih menitik beratkan kepada kegiatan pengumpulan data visualisasi secara mendetail pada seluruh kawasan. Merupakan bahan data kasar yang dapat dijadikan pegangan untuk memulai kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan kawasan merupakan inti dari tahap persiapan. Semua data survey dan pengumpulan data terukur terangkum dalam peta-peta yang menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Diantara peta-peta tersebut adalah : (1) Peta topografi, (2) Peta eksisting dan tipologi bangunan, (3) Peta zoning kawasan berdasarkan karakteristik, (3) Peta sebaran vegetasi, (4) Peta perencanaan pengembangan sirkulasi, (5) Peta penataan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Dari pembuatan peta-peta tersebut yang telah terealisasi adalah peta topografi dan peta zoning kawasan berdasarkan karakteristik seperti yang tertera pada lampiran gambar. Berdasarkan konsep zoning yang akan dibagi berdasarkan zona-zona sebagai arahan yang lebih detail untuk mengembangkan kawasan ini secara bertahap. Zona ini selain menjadi pembagi dan juga menjadi penyatu ruang tergantung jenis dan kriteria pembagian zona, yakni antara lain : (1) Zona aksesibilitas ranmor roda empat/lebih, ranmor roda dua, sepeda/becak, pejalan kaki. (2) Zona area wisata kawasan sejarah, kawasan perkebunan, kawasan wisata desa, kawasan wisata umum. (3) Zona fungsi (area servis, pembatasan kawasan, area pengelola).

Dari ketiga zona yang disebutkan diatas dalam implementasinya hanya terealisasi konsep pembagian zona berdasarkan jenis wisatanya saja artinya keharusan dalam pembagian zona yang telah dititikberatkan pada tahap awal tersebut belum dapat direalisasikan secara keseluruhan dengan maksimal.

Sementara pada pembagian zona berdasarkan jenis wisata tersebut yang harus dilakukan adalah : (1) Sebagai kawasan Kampung Tengah Dan Sungai Mempura direncanakan sebagai wisata sejarah. (2) Sebagian Desa Sungai Mempura khusunya kawasan sekitar DAS Mempura diarahkan sebagai zona wisata alam. (3) Sedangkan kawasan Tambak Rejo Dan Kampung Agam diarahkan sebagai zona agrowisata.

Berdasarkan konsep pembagian zona di atas pada tahap awal ini memang seharusnya sudah diselesaikan. Namun kondisi dilapangan yang penulis amati bahwa kawasan yang dimaksud ada yang belum terjamah sama sekali. Yakni pada rencana kawasan wisata sejarah di Desa Kampung Tengah. Desa ini belum mendapat sentuhan pembangunan yang seharusnya memang telah direncanakan akan tetapi belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah Agrowista Mempura ini yang didasari pada indikator sebagai tujuan pembagian fungsi kawasan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Amrun Salmun yang mengatakan :

Dengan adanya pembagian zona kawasan diharapkan akan memudahkan wisatawan nantinya dalam memilih atraksi wisata sesuai dengan kecendrungan dan minat wistawan yang besangkutan.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowisata Mempura Kabupaten Siak, 20 Oktober 2010, 09:00 WIB).

Ungkapan di atas menjelaskan tentang bagaimana tujuan kegiatan ini dilakukan, nyatanya hal tersebut sangat membantu wisatawan dalam minat terhadap kunjungan yang akan dilakukan sehingga tidak perlu bingung dalam memilih tempat rekreasi. Ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak :

Tujuan dalam pembagian fungsi kawasan ini dimaksudkan untuk mempermudah wisatawan dalam memilih minat yang mana apakah wisata alam, wisata sejarah ataupun wisata pertanian atau perkebunan. Sehingga wisatawan tidak jenuh jika hanya pada satu kawasan dan dapat berganti suasana (Adli Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 22 September 2010, 12: 05 WIB).

Dari ungkapan di atas, dapat dimengerti bahwa memang tujuan pembagian fungsi kawasan sebagai maksud untuk membuat wisatawan merasa nyaman dan lebih merasa ada perubahan pada tiap – tiap kawasan yang dikunjungi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata :

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar tidak adanya kesemerawutan dalam penataan. Sehingga dapat terlihat lebih rapi dan para penikmat atau pengunjung pun merasa dimanjakan oleh potensi desa dan keindahan dan eksotiknya wisata sejarah yang telah dilestarikan. Jadinya, ada tujuan – tujuan tersendiri yang telah direncanakan untuk menarik para pengunjung (Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 22 september 2010 16 : 17 WIB)

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Camat Mempura terhadap tujuan pembagian kawasan ini akan tetapi sebenarnya memiliki maksud yang sama dalam penataan kawasan. Berikut petikan wawancaranya :

Rencana ini memiliki konsep- konsep yang cukup matang, sehingga hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya mempermudah dan mempercantik penataan. Sehingga program – program yang telah tersusun dengan rapi dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Artinya, setelah fungsi kawasan ini dibagi selanjutnya perlu ada pendekatan program pada setiap kawasan. Jadi, pelaksanaan penataan pun lebih cepat terealisasi. (Indra Atmadja, Camat Mempura, 21 September 2010 09 : 00 WIB).

Demikian apa yang telah diungkapkan oleh responden bahwa peneliti menyimpulkan bahwa rencana penataan kawasan benar - benar telah dipersiapkan dengan matang dan cukup memiliki maksud dan tujuan yang jelas sehingga tidak lagi ada hal-hal yang terlewatkan. Maksudnya secara keseluruhan dapat terpantau dengan baik dan mempermudah kerja tim dan juga mempermudah wisatawan dalam menentukan tujuan wisata.

Berikut mengenai indikator yang menjelaskan tentang sistem penataan kawasan. Untuk lebih jelasnya telah diungkapkan oleh Sekda sebagai berikut :

Sebenarnya penataan kawasan ini dengan maksud tidak merubah struktur kawasan yang aslinya. Karena, jika banyak perombakan dilakukan akan lebih menyulitkan

tim untuk bekerja. Sehingga harus lebih memikirkan apa lagi yang akan dikembangkan. Jadi, oleh karena itulah hanya sebatas pelestarian dan pembenahan kembali pada strukturnya. (Adli malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 22 September 2010, 12 : 10 WIB).

Untuk lebih diperhatikan bahwa dari ungkapan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak berkenaan dengan sistem penataan kawasan memiliki konsep yang sama dengan apa yang akan dilaksanakan. Dan apabila hal tersebut terdapat perbedaan perlu ditinjau kembali oleh Instansi terkait. Berikut pendapat kepala Dinas Pariwisata mengungkapkan :

Rencana-rencana ini telah dipertimbangkan dengan sangat matang. Jadi, dalam penataan kawasan pun hanya tinggal memperbaiki atau mempermudah mencapai akses wisata. Maksud saya, seperti makam bersejarah, itu hampir runtuh karena berada di dekat aliran anak sungai. Nah, seperti itulah kira –kira konsep penataan dilakukan.

Jika penataan kawasan dilakukan dengan perubahan, misalnya memindahkan makam maka akan banyak protes masyarakat setempat. Maka dari itu, tim berusaha mengenalkan kembali keaslian sejarah seperti peninggalan bersejarah yang berada didesa tersebut. (Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 22 september 2010, 16 : 13 WIB).

Untuk lebih jelasnya dapat dipahami seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim Bina Mulia :

Yang ingin dijelaskan adalah bahwa kegiatan ini dilakukan dengan berbagai aspek. Sehingga ada zona- zona yang perlu diperhatikan sebagai bentuk kegiatan. Misalnya adanya zona penerima, zona kegiatan utama, zona pendukung dan komersial. Dengan seperti ini, ada urutan tertentu yang mengharuskan pengunjung mengikuti alur kegiatan wisata. Selain itu juga, untuk tim sendiri akan dibagi ahli yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang saya maksud adalah, dengan potensi kawasan ada beberapa desa yang menjadi zona, seperti desa kampung tengah sebagai wisata sejarah, desa mempura sebagai wisata alam dan desa tambak rejo diarahkan sebagai wisata agrowisata. Seperti itu, sebenarnya penataan kawasan akan dilakukan.(Amrun Salmun, Ketua Tim Bina Mulia Agrowisata Mempura, 20 Oktober 2010, 09 : 18 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan memang konsep pembagian fungsi kawasan telah disusun dengan baik akan tetapi pada tahap implementasinya banyak terjadi kegagalan – kegagalan sehingga tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Seperti yang terlihat pada pembagian fungsi kawasan di ketiga desa yang telah direncanakan. Akan tetapi realisasi fungsi kawasan yang dikerjakan hanya pada Desa mempura saja padahal Desa kampung tengah seharusnya juga telah dibuat kawasan sebagaimana yang telah dikonsepkan.

## 2. Rencana Peruntukan Lahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahap awal ini perencanaan peruntukan lahan adalah pembebasan lahan masyarakat yang akan terpakai untuk kegiatan pembangunan. Artinya berdasarkan konsep zoning yang telah ditetapkan berdasarkan pemetaan kawasan

akan ada menggunakan tanah masyarakat dengan perjanjian ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah kegiatan tahap selanjutnya.

Dari kawasan pemetaan lokasi pembebasan lahan akan mengenai beberapa desa antara lain desa kampung tengah, desa tambak rejo dan desa batu agam. Akan tetapi pada implementasinya kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Pada tahap awal ini yang baru digunakan adalah lahan sebagai pembangunan pelataran dan balai pertemuan. Sementara pada desa kampung tengah sebagai kawasan sejarah tidak ada disosialisasikan masalah pembebasan lahan tersebut. Artinya pada tahap ini kegiatan belum maksimal dilakukan disebabkan oleh beberapa kendala selain tidak maunya masyarakat menyerahkan lahan juga dikarenakan kurangnya instansi terkait untuk memberikan pengertian pada masyarakat.

Seperti yang telah diungkapkan responden bahwa selain penataan kawasan juga yang perlu diperhatikan masalah peruntukan lahan. Hal ini tentu sangat sensitif untuk dibicarakan. Apalagi kecurigaan masyarakat akan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut petikan wawancara mengenai rencana peruntukan lahan.

Untuk hal ini memang sebenarnya ada sedikit kendala, dikarenakan kecurigaan masyarakat yang berlebihan. Akan tetapi kami tetap terus berusaha meyakinkan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan program ini. Meskipun dengan berbagai pendekatan- pendekatan telah dilakukan dengan tujuan menggali informasi kepada masyarakat akan keinginan mereka dan juga kemauan masyarakat untuk menjadi lebih maju.

Disini masyarakat khawatir akan penipuan dan kerugian – kerugian terhadap lahan mereka yang akan dipakai oleh pemerintah. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang bersedia lahanya digunakan untuk pembangunan wisata dengan perjanjian ganti rugi (Indra Atmadja, Camat Mempura, 22 September 2010, 09 : 25 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak berkenaan dengan masalah yang dianggap rumit ini. Akan tetapi dengan penuh keyakinan Adli mengungkapkan :

Dari berbagai instansi – instansi terkait tetap mengupayakan adanya ganti rugi pada masyarakat yang mau menyerahkan lahan mereka untuk digunakan. Dengan penjelasan yang cukup menghabiskan banyak waktu ini, kami menyarankan kepada masyarakat untuk membantu program pemerintah demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Tapi, sampai saat sekarang ini masih ada juga masyarakat yang enggan menerima penawaran tersebut. (Adli Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 22 September 2010, 12 : 30 WIB).

Dari petikan wawancara ini penulis memahami bahwa ini merupakan salah satu kendala penataan kawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan agak sedikit tersendat. Tetapi hal ini dipertegas oleh Amrun Salmun yang mengungkapkan :

Rencana peruntukan lahan kawasan ini adalah rencana site dari masing – masing fasilitas yang direncanakan untuk dibangun didalam kawasan. Rencana peruntukan lahan bersifat fiksibel dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, aspek kepemilikan lahan dan juga aspek pencapaian. Sehingga dari tim telah memperjelas penataan ini dalam pembagian yang tergambar dalam pemetaan kawasan. (Amrun Salmun, Ketua Tim Bina Mulia Agrowisata Mempura, 20 Oktober 2010, 09 : 21).

Dari petikan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masalah peruntukan lahan sudah digambarkan dengan teliti. Alasan tersebut dapat dijelaskan pada pemetaan kawasan

sebagaimana data yang diperoleh dari dinas pariwisata. Artinya, telah ada persiapan – persiapan untuk mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua RT 1 Desa Mempura yang mengatakan :

Dalam kegiatan penataan kawasan ini masalah peruntukan lahan memang ada sosialisasi yang diberikan tetapi tidak jelas kemana arahnya sehingga kami masyarakat kurang memahami bagaimana sebenarnya program pengembangan ini akan berjalan.(M. Idris, Ketua RT 1 Desa Mempura, 1 November 2010, 09 :00 WIB)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh masyarakat setempat berdasarkan hasil petikan wawancara berikut ini :

Setahu saya sosialisasi memang pernah dilakukan tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak masyarakat setempat khususnya karena belum ada penjelasan yang detail tentang bagaimana sebenarnya pembagian itu. (Hendra, Wiraswasta, 2 November 2010, 08 :30 WIB).

### 3. Rencana Sirkulasi dan Penghubung

Pencapaian utama didalam kawasan bagi kendaraan yang dialirkan melalui jalan sri kambayat dan tambak rejo. Kendaraan yang masuk pada kedua jalan ini dibatasi hanya untuk kendaraan berbobot sedang, hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dan kelestarian alam didalam kawasan. Pembatasan kawasan dilakukan secara ketat pada jalan tengku buang asmara dan sebagian jalan Tambak Rejo. Kendaraan yang diperbolehkan hanyalah kendaraan pribadi milik masyarakat yang bemukim didalam kawasan dan kendaraan khusus yang disediakan pengelola. Hal ini selain dimaksudkan untuk menjaga kondisi jalan, juga untuk menjaga suasana alam yang teduh didalam kawasan.

Pada sistem sirkulasi pejalan kaki pada kawasan dapat dikelompokkan pada dua bagian yaitu pada pejalan kaki utama yang membentang dari timur laut kearah barat daya disepanjang jalan tengku buang asmara dan jalan sri kembayat serta dari arah tenggara kebarat laut pada jalan tambak rejo. Adapun jalur pejalan kaki lainnya merupakan jalur yang melintasi kawasan pemukimn dan fasilitas wisata dalam kawasan, menghubungkan antara jalur utama yang satu dengan jalur utama yang lain. Sementara sistem parkir mempengaruhi kualitas lingkungan kawasan dalam kaitannya dengan kegiatan komersial serta dampak visualnya. Sistem parkir ini terdiri atas parkir didalam lahan perencanaan, sedangkan parkir pada badan jalan tidak diakomodir pada kawasan ini. Berikut hasil petikan wawancara tentang penataan sirkulasi penghubung kawasan wisata.

Memang ada konsep rencana penataan kawasan untuk sirkulasi seperti yang telah dijelaskan pada panduan program. Untuk lebih detailnya saya kurang memahami. Tapi, secara garis besar memang sudah dibuat sirkulasi penghubung yang ditata dengan rapi(Adli Malik, Sekda Kabupaten Siak, 22 September 2010, 12 : 43 WIB).

Dari hasil petikan wawancara diatas penulis kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Camat Mempura seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

Desa setempat memang belum memiliki fasilitas yang memadai seperti masalah sirkulasi penghubung. Ini sangat ironis memang, karena kondisi desa yang masih asri sehingga terkadang masyarakatpun tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Maka dari itu perlu disusun rapi akan penataan sirkulasi kendaraan dan juga penghubung agar lebih terarah dan terpadu.(Indra Atmadja, Camat Mempura, 22 September 2010, 09 : 47 WIB).

Pernyataan ini pun didukung oleh Amrun Salmun yang manyatakan bahwa :

Kondisi Desa memang agak menyulitkan kami selaku tim untuk membuat penataan akan tetapi kegiatan ini dimaksudkan agar adanya pembatasan kendaraan yang masuk. Kemudian juga dimaksudkan untuk menjaga kondisi jalan dan suasana alam yang teduh dan tenang didalam kawasan (Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowisata Mempura, 20 Oktober 2010, 09 : 47 WIB)

Berikut juga penjelasan berkenaan persoalan sirkulasi penghubung seperti yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak :

Terkait pembatasan kendaraan yang masuk kedalam kawasan, maka perlu adanya pengadaan kendaraan penghubung yang dapat membantu mobilitas pengunjung didalam kawasan. Kendaraan yg disediakan menghubungkan pergerakan pengunjung dari area parkir kendaraan ke objek wisata yang ada didalam kawasan. (Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 22 September 2010, 16 : 55 WIB).

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakat setempat. Berikut petikan wawancaranya :

Fasilitas yang dibuat oleh pemerintah desa ini memang sudah ada yang terlaksana namun belum secara keseluruhan yang dibangun karena masih banyak yang terbengkalai, hal ini juga sebenarnya membuat masyarakat menjadi khawatir karena akan merusak potensi desa yang masih asri (Makmur, Petani, 2 November 2010, 10 : 05 WIB).

#### 4. Pengembangan Fasilitas Umum Dan Wisata

Pada kegiatan tahap ini juga telah direncanakan penggerjaan pembangunan gedung dan yang lainnya. Kegiatan yang direncanakan itu adalah pembuatan balai pertemuan, pasar tradisional, balai bibit tanaman kehutanan, restoran, sarana kesehatan, sekolah berbasis lingkungan serta posko keamanan.

Pembangunan balai pertemuan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya suatu gedung pertemuan yang dapat digunakan sebagai tempat musyawarah. Selain itu juga di fungsikan sebagai sarana pendukung kegiatan wisata konvensi seperti seminar, pelatihan, workshop, penyuluhan dan sebagainya.

Dari rangkaian fasilitas umum yang telah direncanakan secara umum berdasarkan hasil pengamatan peneliti belum dapat terealisasikan secara keseluruhan. Pada tahap ini yang nampak terlihat adalah gedung balai pertemuan yang masih belum sempurna dan bibit tanaman yang hanya dimiliki beberapa rumah saja yang diperoleh dari dinas pertanian antara lain jagung, cabe, mangga, rambutan, jeruk. Dan untuk fasilitas yang lain belum bisa dilaksanakan karena juga terkait masalah kerja sama dengan instansi terkait dan juga soal anggaran.

Untuk pengembangan wisata yang telah direncanakan antara lain adalah out bound, taman burung/kupu-kupu, arena sepeda cross, museum tenun, pengembangan areal situs kerajaan siak, kawasan pemukiman melayu, objek wisata air dll. Kegiatan ini baru dapat terealisasi apabila telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan anggota dewan. Namun pada kenyataannya pengajuan program tahap kedua tersendat dikarenakan persoalan pemeriksaan kekayaan Pemerintah Daerah Siak (masalah korupsi) dan juga pergantian Kepala Daerah periode selanjutnya.

Konsep pengembangan fasilitas dikawasan perencanaan didasarkan pada konsep umum perencanaan berupa keterpaduan antara kegiatan wisata dan alam. Adapun konsep pengembangan fasilitas dikawasan agrowisata Mempura antara lain dapat dijelaskan pada wawancara berikut ini :

Kegiatan wisata ini tentu memerlukan banyak kebutuhan – kebutuhan. Antara lain fasilitas umum seperti MCK, atau sarana – sarana lainnya sebagai penunjang. Jadi pada tahap awal adanya pembangunan jalan serta tempat peristirahatan dan samapi saat ini pembangunan sudah berjalan aman tanpa ada kendala (Sahril, Anggota Sekretariat Tim Bina Mulia, 23 September 2010, 08 :05 WIB)

Seperti berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat oleh M. Nasir dan Kamarudin yang mengatakan :

Selama kegiatan berlangsung yang baru saja terealisasi adalah paving block, semenisasi, WC umum, bronjong turap dan balai yang masih belum sempurna pembangunannya. Dan saat ini sepertinya belum ada tindak lanjutnya sama sekali. Barangkali pemerintah mengalami kekurangan dana untuk penyelesaian untuk tahap selanjutnya. (M. Nasir, Wiraswasta, 2 November 2010, 11 : 11 WIB).

Pelaksanaan program pemerintah dibidang pariwisata terhadap pembangunan fasilitas umum belum terlihat sempurna karena saat ini masih penggerjaan pembuatan jalan, MCK dan pelataran saja. Untuk jembatan belum ada perbaikan sama sekali. (Kamarudin, PGAN, 2 November 2010, 13 : 05 WIB).

Tidak hanya sampai disitu penjelasan yang dapat penulis amati. Akan tetapi seperti halnya yang dijelaskan oleh Amrun Salmun bahwa :

Konsep pengembangan fasilitas dikawasan sudah diatur sedemikian rupa dan tanpa kendala dan penataan yang dimaksud yaitu penempatan fasilitas disesuaikan dengan pembagian zona wisata yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian fasilitas yang dikembangkan mempertimbangkan interaksi dengan kondisi alam dan kawasan serta fasilitas yang akan dikembangkan mempertimbangkan kemudahan pencapaian sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. (Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:52 WIB)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan adanya penataan yang sangat terarah dan signifikan sehingga kegiatan pengembangan terhadap penataan fungsi kawasan dapat disempurnakan sehingga menimbulkan kenyamanan pengunjung. Berikut dijelaskan pula oleh Sekda Siak :

Seperti yang telah kita ketahui bahwa fasilitas umum sebagai penunjang sangat diperlukan, jadi perlu dibangun fasilitas sesuai kebutuhan saja dan jangan sampai terlalu berlebihan, jadi nantinya akan ada penambahan biaya pula. Sebagai kendala tidak ada yang begitu berarti untuk dipermasalahkan pada tahap awal ini. (Adli Malik, Sedka Kab Siak, 22 September 2010, 13 :00 WIB).

Pernyataan ini sangat membantu penulis dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan pengembangan agrowisata mempura dengan diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Kadri Yafis dibawah ini :

Apabila tahap awal ini tidak dilakukan pembangunan fasilitas umum maka bisa saja dianggap gagal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hal ini sangat penting.

Walaupun sampai saat ini belum ditemukan kendala yang berarti akan tetapi kegiatan awal ini jangan sampai terlewati begitu saja. Misalnya fasilitas homestay untuk pengunjung yang berasal dari daerah yang jauh dari kawasan. (Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Siak, 21 September 2010, 16 : 53 WIB)

Jadi, kegiatan-kegiatan yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan fasilitas demi penyempurnaan kawasan wisata. Sehingga, bentuk penataan dan penyempurnaan tataruang kawasan lebih rapi lagi. Oleh karena itu, fasilitas kawasan yang beraitan dengan aliran listrik, penerangan jalan dan penyediaan air bersih dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

b. Kegiatan Program Pengembangan Histourism Dan Religio

Agrowisata Mempura terdiri dari potensi alam yang terbuka, sungai, hutan, perkuburan dan potensi budaya yang masih asli. Untuk melaksanakan pengembangan kawasan yang tersarang dan mencapai saran dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu adanya rencana yang dapat dijadikan panduan.

1. Pelestarian Alam Dan Bangunan Bersejarah Dalam Kawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan masalah pelestarian alam dan bangunan bersejarah seperti yang diungkapkan adalah sebagai berikut :

Untuk memelihara peninggalan bersejarah yang saat ini sudah mulai terlupakan oleh masyarakat kita yang memiliki gaya hidup modern serta merta membuat artefak bersejarah ini menjadi nilai dan daya tarik tersendiri yang berbeda dari tempat wisata lainnya.(Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 21 September 2010, 17 :18 WIB).

Hal ini juga sama seperti apa yang diungkapkan oleh Camat Mempura tentang wisata sejarah dalam Pengembangan Agrowisata Mempura dibawah ini :

Sebenarnya bangunan rumah masyarakat secara umum relatif baik dengan mayoritas rumah berupa bangunan semi permanen, berbahan dasar kayu dengan umpak beton dan atap seng berbentuk limas. Bentuk bangunan seperti ini merupakan bangunan rumah khas yang banyak terdapat di daerah siak dan tentunya memberikan kesan kemewahan yang khas pada kawasan permukiman ini. Jadi, itupula lah yang menjadi upaya pelestarian yang harus dilakukan. (Indra Atmadja, Camat Mempura, 23 September 2010, 09 : 22 WIB)

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh responden lain tentang kegiatan pengembangan ini.

Selain dalam upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan berbagai bentuk bangunan tua yang masih bisa dipergunakan lagi meskipun sebagai faktor pendukungnya adalah potensi desa yang lumayan memadai kami masih tetap berupaya mensosialisasikan pada masyarakat untuk tidak merusak dan memperparah keadaan banguan tua tersebut.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:58 WIB)

Dari pernyataan diatas ada ungkapan yang berbeda ungkapan dari hasil wawancara berikut yang mengatakan bahwa :

Secara deteil belum mengataui apa yang sebenarnya dilakukan akan tetapi sudah pastinya hal ini memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai pusat ekowisata sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.(Nurdahlia, Wiraswasta, 2 November 2010, 14 : 03 WIB)

## 2. Peningkatan Hasil Pertanian dan Perkebunan

Menanamkan rasa peduli pada lingkungan dengan memasyarakatkan gerakan peduli pada lingkungan dan juga masalah pertanian dan perkebunan demi kesejahteraan dan juga ekonomi masyarakat. Berikut petikan wawancara tentang masalah pengembangan dilakukan.

Selain sebagai bentuk kegiatan wisata maka kepada masyarakat setempat pun sudah diberikan pencerahan tentang tujuan dari wisata ini adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan usaha pertanian desa setempat.dan memang layak dijadikan objek wisata dengan penanganan yang khusus nanti pada rencana pengelolaan selanjutnya.(Fahzan,Tim Teknis Binamulia, 21 September 2010, 17 :17 WIB).

Meski berbagai upaya telah dilakukan akan tetapi berdasarkan wawancara diatas ternyata masih banyak upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mendapat dukungan sepenuhnya. Seperti yang diungkapkan oleh Darmawaty berikut :

Upaya ini secara umum memang menggunakan lahan yang didominasi oleh hutan kebun dan lahan pertanian. Hanya sebagian kecil yang merupakan kawasan terbangun sehingga dengan demikian layak dijadikan tempat wisata sebenarnya kegiatan ini sudah disosialisasikan tentang manfaat peningkatan hasil pertanian dan perkebunan ini dibuat.(Darmawaty,Wiraswasta, 7 September 2010, 09 : 22 WIB)

Dari beberapa pernyataan diatas ternyata kendala tersebut tak jauh berbeda seperti apa yang diungkapkan dibawah ini :

Banyak terdapat hasil pertanian dan perkebunan yanng dimiliki Desa Mempura ini, selain itu yang menjadi kendala adalah partisipasi masyarakat yang rendah akan minat untuk mengelola pertanian yang lebih baik.(Adli Malik, Sekda Kab Siak, 22 September 2010, 13 :32 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas terlihat sebagian yang menjadi kendala adalah masalah partisiapasi masyarakat yang kurang memberikan dukungan demi kelancaran program pemerintah yang sudah ditetapkan ini.

## 3. Pengembangan Wisata Kawasan

Sebagai optimalisasi pemanfaatan lahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak, sehingga tercapai keseimbangan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi dalam jangka panjang maka seperti pernyataan yang berkenaan dengan pengembangan wisata kawasan terlihat pada wawancara berikut :

Kegiatan ini direncanakan sebagai tujuan utama dibuatnya program wisata kawasan yang berdekatan dengan pemerintah kabupaten ini. Sehingga, memang harus dibuat menjadi lebih menarik seperti pengembangan wista baru misalkan adanya pengembangan museum tenun, kawasan pemukiman malayu dan lain sebagainya.(Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 21 September 2010, 17 :18 WIB).

Masih terdapat banyak kawasan yang perlu dikembangkan sebagai objek wisata akan tetapi memiliki kendala seperti pernyataan berikut :

Rekonstruksi ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dan tentunya membutuhkan proses yang cukup lama, kegiatan ini dimulai dengan studi mendalam, melibatkan beberapa pakar yang bersangkutan dengan kegiatan pengembangan, namun pada tahap awal ini yang saya ketahui dimulai dengan kegiatan terhadap rumah empat datuk suku yang berlokasi disekitar desa kampung tengah.(Indra Atmadja, Camat Mempura, 23 September 2010, 09 : 204WIB).

Jadi, benar bahwa banyak sekali potensi yang terdapat di Desa tersebut akan tetapi potensi masyarakatnya juga menarik untuk dikembangkan. Berikut pernyataan dari Ketua Tim Binamulia :

Masih belum beragamnya daya tarik wista yang terdapat pada kawasan agrowisata telah melahirkan pemikiran untuk mencari alternatif kegiatan yang dapat menyalurkan bakat dan juga dapat menjadi daya tarik wista baru sehingga memang sangat perlu rencana pengembangan kawasan ini dilakukan.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:57 WIB)

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa memang harus ada inovasi – inovasi baru yang akan dikembangkan sebagai kreativitas dari usaha pengembangan wisata. Hal ini sama apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai berikut :

Sedikit banyaknya yang saya ketahui bahwa mengingat perencanaan ini berlangsung lama akan tetapi dalam pelaksanaan tahap awal ini perencanaan pengembangan kawasan dilakukan masih pada tahap penyempurnaan pelataran dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Tapi, untuk pengembangan kawasan wisata sejarah dan wisata baru itu akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Dan ini memang sudah dibuat sedetil mungkin tentang pengembangna wisata tersebut.(Kadir,Petani, 21 September 2010, 13 :39 WIB).

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil data kependudukan dan kurangnya respon masyarakat tentang kegiatan pengembangan ini maka perlu adanya pelatihan atau pun pemberdayaan seperti pernyataan dari wawancara berikut :

Masih belum tersosialisasinya konsep agrowisata kepada masyarakat secara menyeluruh dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan agrowisata ini. Adanya kegiatan ini memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait konsep agrowisata untuk mereka terlibat aktif serta memberikan peluang usaha yang memungkinkan bagi mereka.(M.Zulkifli, Ketua RT 02 Desa Mempura, 12 September 2010, 13 :20 WIB).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan hanya baru sosialisasi atau pengenalan daerah-daerah berpotensi wisata serta pengimbauan penanaman tanaman musim dan non musim dan program ini sebenarnya telah mendapat respon yang cukup baik dimata masyarakat sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah konsisten dalam melaksanakan program masyarakat nanti (Zulkarnaen, Petani, 15 November 2010, 11 : 24 WIB).

Keresahan masyarakat pada program pengembangan wisata ini adalah masalah kurangnya pengetahuan seperti yang diungkapkan berikut :

Meski pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan dalam pengelolaan wisata tapi dari pihak terkait terus memberikan pencerahan namun konsep yang demikian dirancang untuk tidak membebani mereka dalam hal manajemen pemasaran dikarenakan tingkat ketakutan mereka akan kegagalan dalam usaha masih sangat tinggi.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 10: 00 WIB).

Tak jauh berbeda dari pernyataan yang dianggap cukup meyulitkan bagi masyarakat dan pemerintah ini adalah masalah pendidikan dan wawasan. Berikut petikan wawancara dari Sekretaris Daerah Kabupaten Siak berikut :

Jika kemampuan mereka dianggap layak, maka tahap selanjutnya adalah memberdayakan mereka dalam suatu bentuk usaha bersama seperti restoran yang dikelola secara besama pula. Pemisahan kerja yang jelas antara pemasak dan pengelola restoran menjadi alternatif untuk dilaksanakan. Untuk pelatihan berikutnya ada berbagai kerajinan dan juga pelatihan pertanian dan sektor perikanan.(Adli Malik, Sekda Kab Siak, 22 September 2010, 13 : 40 WIB).

#### c. Memberikan Masukan Kebijakan

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan ataupun tugas dan Fungsi Dari Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowistaa Mempura adalah masalah penyusunan kebijakan yang dirancang seperti membuat Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan Petunjuk Teknis dibawah ini. Berikut tanggapan responden yang telah memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah tersebut.

##### 1. Membuat Rancangan Pengembangan Kawasan

Dalam penyusunan konsep awal telah dirancang berbagai konsep pengembangan hal ini ditujukan untuk kegiatan tahap berikutnya. Kegiatan tahap ini sebagai pedoman awal dan kemudian dilanjutkan pada konsep perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat terlihat setelah terbentuknya konsep awal namun belum terealisasi secara maksimal memungkinkan akan terjadi kemandekan pada tahap selanjutnya yang pada intinya akan membuat pemborosan anggaran.

Adapun berbagai persoalan yang dihadapi dalam masalah penyusunan kebijakan ini sebagai masukan yang dirancang untuk dapat lebih diperhatikan oleh pihak terkait seperti yang diungkapkan oleh Kadri Yafis berikut :

Meskipun masih terdapat kendala dalam penyusunan kebijakan akan tetapi masih tetap diusahakan sesegera mungkin menyelesaikan membuat kebijakan yang berkenaan dengan agrowisata agar dalam pelaksanaan tidak berlangsung lama. Seluruh kegiatan melibatkan insasansi tekaik dan pada saat ini akan ada perombakan anggota tim untuk lebih efesien dan efektif.(Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 21 September 2010, 17 : 34 WIB).

Hal ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh responden yakni Camat Mempura berkenan dengan penyusunan kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah.

Rancangan ini memang berlangsung rumit tapi pada tahap selanjutnya masih dalam proses penyusunan anggota baru. Sehingga harapannya adalah mampu memberikan masukan kebijakan tentang pariwisata yang lebih baik sehingga menghasilkan

kualitas produk kebijakan yg baik pula ( Indra Atmadja, Camat Mempura, 23 September 2010, 09 : 30 WIB)

Banyak yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu keputusan apalagi kebijakan daerah sebagai tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ini. Seperti yang diungkapkan oleh responden berikut :

Mengingat pentingnya kebijakan ini dibuat maka seluruh rancangan dibuat sedetil mungkin sehingga seluruh aktifitas dapat terpantau dan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya masukan kebijakan bagi pemerintah tentang kegiatan pariwisata khususnya pengembangan agrowista mempura ini.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:56 WIB)

Meskipun kebijakan itu penting akan tetapi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Adli Malik sebagai berikut :

Maksud dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan pemerintah mengontrol seluruh aktivitas pariwisata dimempura agar tidak melakukan kegiatan wisata diluar aturan yang sudah akan diberlakukan nantinya. Dan ini mesti ditinjau kembali agar tidak ada kekeliruan didalam menetapkan keputusan.(Adli Malik, Sekda Kab Siak, 22 September 2010, 13 :40WIB).

Jadi, seperti yang telah dirangkum dari beberapa pernyataan yang berkenaan dengan masalah masukan kebijakan yang tertuang dalam produk kebijakan atau peraturan daerah seperti yang dijelaskan diatas adalah masalah kesepakatan agar seluruh rangkaian kebijakan yang dibuat dapat betul – betul dipertimbangkan.

## 2. Membuat Buku Induk/Pedoman Kegiatan Atau Petunjuk Teknis

Dalam mengimplementasikan konsep penataan kawasan dalam perencanaan tapak, tata letak, siruklasi dan lain sebagainya yang menjadi kegiatan utama dalam proses pengembangan ini adalah perlunya dibuat suatu pedoman kegiatan yang menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan teknis tahap selanjutnya. Berikut pernyataan tentang masalah rancangan buku induk atau petunjuk teknis kegiatan lapangan program Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak.

Untuk penyusunan rancangan kegiatan ini sebenarnya tidak ada kendala yang cukup berarti. Dikarenakan seluruh instansi terkait sangat berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut jadi semuanya berjalan dengan lancar.(Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 21 September 2010, 17 :45 WIB).

Hal yang sama seperti apa yang diungkapkan oleh Indra Atmadaja selaku Camat Mempura sebagai berikut :

Pada saat ini meski masih dalam proses pengajuan saja rancangan kebijakan tahap kedua, akan tetapi semuanya berjalan dengan baik.(Indra Atmadja, Camat Mempura, 23 September 2010, 09 : 24 WIB)

Dari wawancara diatas beberapa kendala juga diungkapkan oleh Ketua Tim Binamulia sebagai berikut :

Memang ada sedikit kendala pada tahap penyusunan kebijakan tahap kedua ini. Yaitu masalah dana dan waktu yang agak diperpanjang. Tapi saya optimis kegiatan

ini akan tetap berlangsung.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:52 WIB)

Masalah-masalah teknis seperti yang diungkapkan oleh responden di atas bukanlah hal yang perlu ditakuti oleh pemerintah seperti apa yang telah dijelaskan oleh Adli Malik berikut :

Sebenarnya untuk masalah teknis tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sampai saat ini semua kegiatan berlangsung aman. Tapi, untuk tahap selanjutnya kita bersama instansi tekai mengusahakan agar kegiatan ini dapat segera diselesaikan agar tidak membuang waktu percuma.(Adli Malik, Sekda Kab Siak, 22 September 2010, 13 : 36WIB).

Jadi, apapun yang menjadi persoalan dalam upaya pengembangan kawasan agrowisata Mempura adalah hal yang harus secara bersama-sama dipertanggungjawabkan demi kelancaran kegiatan secara sempurna, efesien dan efektif sehingga dampak yang dihasilkan dapat diminimalisirkan dan ditanggulangi.

### 3. Membuat Kebijakan Pelestarian Kawasan

Untuk lebih jelasnya kegiatan penyusunan kebijakan yang tertuang dalam sebuah peraturan desa yang dimaksud bisa dilihat pada wawancara dari beberapa responden yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci terhadap apa yang boleh dan yang tidak dilakukan didalam kegiatan pengembangan kawasan terkait fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan agrowisata. Dan pada saat ini masih dalam tahap perbaikan atau tahap peninjauan kembali akan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan.(Kadri Yafis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 21 September 2010, 17 :30 WIB).

Dari pernyataan di atas tentang arti penting penyusunan kebijakan ini dibuat. Berikut wawancara dengan Amrun Salmun :

Berhubung akan terdapat banyak sekali aktivitas – aktivitas pada kawasan tersebut maka memang perlu rancangan kebijakan ini disusun agar seluruh kegiatan dapat terawasi oleh pemerintah setempat. Meskipun baru berlangsung satu tahun tapi sebenarnya hubungan kerja sama dari pihak pemerintah desa dan daerah cukup baik dan saling memberikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut.

(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowista Mempura, 20 Oktober 2010, 09:57 WIB).

Apapun yang akan dihasilkan pada kebijakan nanti tentunya menjadi perhatian masyarakat setempat untuk mempertimbangkan kesepakatan tersebut. Agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada pelaksanaan pengembangan kawasan nanti. Seperti yang diungkapkan oleh responden berikut :

Produk kebijakan yang dibuat oleh tim pelaksana itu sendiri berkaitan dengan kegiatan pengembangan pada desa tersebut tentunya menguntung desa yang bersangkutan. Artinya seluruh aktivitas yang menjadi pantauan mereka adalah memberikan peluang desa untuk lebih produktif dan meski baru berlangsung kebijakan yang dibuat akan tetap disaring dan disesuaikan oleh adat setempat.(Adli Malik, Sekda Kab Siak, 22 September 2010, 13 :33WIB).

Dari hasil penelitian seluruh responden dapat diketahui dari berbagai indikator yang menyebabkan terlaksana atau kurang Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Mempura Kabupaten Siak disebabkan oleh beberapa hal. Untuk lebih mempermudah pengamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Yang Menyebabkan terlaksana Atau Kurang terlaksananya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Mempura Kabupaten Siak.

Variabel	Indikator	Item penilaian	Terlaksana/kurang terlaksana/belum terlaksana
Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak	<p>a. Kegiatan penataan dan penyempurnaan terhadap tata ruang Agrowisata.</p> <p>b. Kegiatan pengembangan Histourism dan Religio.</p> <p>c. Memberi masukan kebijakan kepada pemerintah.</p>	<p>1. Pembagian fungsi kawasan</p> <p>2. Rencana peruntukan lahan</p> <p>3. Rencana sirkulasi dan penghubung</p> <p>4. Pengembangan fasilitas umum dan wisata</p> <p>1. Pelestraian alam dan bangunan bersejarah dalam kawasan</p> <p>2. Peningkatan hasil pertanian dan perkebunan</p> <p>3. Pengembangan wisata kawasan</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat</p> <p>1. Membuat rancangan kegiatan</p> <p>2. Membuat buku induk/pedoman kegiatan</p> <p>3. Membuat kebijakan pelestarian kawasan</p>	<p>Kurang terlaksana</p> <p>Kurang terlaksana</p> <p>Kurang terlaksana</p> <p>Kurang terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>

Sumber : Data Olahan Lapangan

Dari tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa indikator yang menyebabkan kurang terlaksananya penataan kawasan sebagai bentuk penataan pembagian kawasan adalah zona berdasarkan jenis wisata, zona berdasarkan bentuk kegiatan, berdasarkan pembagian zona tersebut zona kawasan itu sendiri yakni zona wisata agro, zona wisata sejarah dan zona wisata alam. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut belum memperlihatkan hasil secara maksimal. Selanjutnya penulis mencari informasi seperti yang diungkapkan oleh Sutarno dari hasil wawancara singkat di DPRD kabupaten Siak yang mengatakan bahwa :

“Dalam program kegiatan ini memang memiliki tujuan untuk mewujudkan upaya pemerintah dari segi pariwisata agar wisatawan yang berkunjung tidak merasa bosan.

Dan untuk masalah anggaran kegiatan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati dan disahkan. Dan, Memang berfungsi atau tidaknya anggota tim ini tergantung

bagaimana pihak terkait mau menggerakkan organisasi tersebut sehingga tujuan perencanaan ini tercapai sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kami hanya menunggu hasil kerjanya saja.

Saat ini sepertinya ada kendala yang dihadapi sehingga mengalami kemacetan dan terbengkalai. Namun mengingat ada keterkaitan dengan isu – isu politik tentang pergantian kepala daerah yang baru itu tergantung kebijakan pemerintah untuk menindak lanjutinya.”. (Sutarno, Anggota DPRD komisi III Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Kota Siak, 19 September 2010, 10 :15 WIB)”

Jadi, cukup bisa dipahami bahwa sebenarnya memang mengacu pada pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa program kegiatan ini memiliki beberapa kendala selain dari dukungan masyarakat juga perlu dukungan politik dan juga dukungan pemerintah.

Sementara yang dimaksud penataan pada kegiatan peruntukan lahan adalah dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, aspek kepemilikan dan aspek pencapaian. Berdasarkan data atau dokumentasi yang ada jelaslah bahwa kegiatan tersebut akan menggunakan sebagian besar lahan masyarakat setempat. Oleh karena itu sulit untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arti penting tujuan wisata ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fahzan dan Amrun bahwas :

Keseluruhan rangkaian kegiatan ini telah ada direncanakan sebelumnya. baik itu masalah kontinuitas kerja, masalah disiplin kerja atau standar kerja sudah dijelaskan. Hanya saja tidak ada ketegasan – ketegasan dan juga kontrol. Mungkin hal itu pula yang mengakibatkan pelaksanaan pengembangan ini belum maksimal.

Namun, sebenarnya tim sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal ini namun sepertinya reaksi masyarakat belum menunjukkan itikad baik mungkin dikarenakan kurang percaya kepada pemerintah dari segi pembangunan dan juga kurangnya pemahaman masyarakat dalam program wisata ini. (Fahzan S.T, Tim Teknis Pengembangan Kawasan Agrowisata, 20 September 2010, 15 : 40WIB).

Bahwasannya komunikasi dalam suatu organisasi dapat diidentikan dengan sistem syaraf dalam suatu organisasi yang hidup. Jadi, bersamaan dengan itu kurangnya umpan balik dari pihak terkait sehingga membuat aktivitas ini menjadi sulit dan seluruh proses pengarahan pun menjadi semerawut.(Amrun Salmun, Ketua Tim Binamulia Agrowisata Mempura Kabupaten Siak, 20 Oktober 2010, 09:45WIB).

Demikian dari rangkaian kegiatan yang memiliki kendala untuk menentukan jaringan informasi dan umpan balik. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa semakin besar organisasi bahwa semakin menuntut pengendalian yang lebih formal dan ketelitian yang jauh lebih besar. Untuk mendapat kepastian terhadap kurangnya respon masyarakat tersebut penulis menanyakan langsung ke kantor kepala desa yang mengatakan :

Masyarakat memang ragu untuk menyerahkan sebagian lahan mereka dikarenakan rasa takut dan tidak percaya bahkan mereka khawatir mendapat kerugian mengingat ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan pemerintah karena memang sebagian besar lahan disini adalah warisan penduduk asli mempura. (Wan Syafi'i, Kepala Desa Mempura, 15 November 2010, 13 : 22 WIB)

Sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan kurangnya respon masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik karena hal tersebut dipandang sangat penting untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat.

Lebih lanjut peneliti menanyakan dengan Adli yang mengatakan :

Sebenarnya jaringan komunikasi kurang cukup efesien untuk mengumpulkan balik informasi yang relevan kepada personalia, kunci pada waktunya agar mereka dengan informasi tersebut dapat mengambil tindakan perbaikan(Adli Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 22 September 2010, 12: 25 WIB).

Senada ungkapan diatas yang menyebutkan bahwa :

Pengendalian yang efektif adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Dengan demikian, pengendalian yang efektif berarti sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar.dikarenakan hal tersebut sebagai suatu sistem harus memiliki karakteristik yang berlaku relatif. Artinya pada waktu yang sama, karakteristik itu berlaku sama dan pada kondisi yang berbeda karakteristik itu berbeda pula.(Siswanto, 2005 :149).

Adapun kendala lain yang berkenaan dengan kegiatan pembuatan sirkulasi atau penghubung jalan, penulis melihat ada keterkaitan dengan persoalan kurangnya kerjasama pihak pemerintah dan anggota tim terlihat pada kegiatan dilapangan sistem sirkulasi dan penghubung dari data yang penulis peroleh kegiatan ini memang perlu dilakukan sebagai kesinambungan ruas-ruas jalan. Karena lokasi kawasan masih banyak terdapat jalan-jalan kecil sehingga perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan daya tarik tersendiri. Namun berdasarkan penelusuran penulis kelapangan berdasarkan lokasi pemetaan penulis melihat belum sempurnanya kegiatan tersebut karena masih ada beberapa ruas jalan yang seharusnya diselesaikan namun tidak tersentuh pembangunan sama sekali.

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan terhadap penataan kawasan oleh pemerintah maupun instansi terkait beserta anggota tim binamulia berada pada kategori kurang terlaksana karena sebanyak 8 orang responden mengatakan bahwa sejumlah kegiatan yang disusun belum optimal dilaksanakan. Misalnya kegiatan pembagian fungsi kawasan artinya rencana yang sudah tersusun, tujuan sudah jelas sebagai pedoman tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun menurut hemat penulis yang didasarkan pada hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan responden terkait persoalan koordinasi yang dilakukan pemerintah sebanyak 10 orang responden dari masyarakat menjawab kurang terlaksana disebabkan sebagian dari mereka kurang tahu bagaimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai konsep yang telah direncanakan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat membuktikan bahwa pemerintah belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan salah seorang masyarakat yang mengatakan bahwa :

Sebenarnya masyarakat sangat mendukung tetapi pemerintah harus mengutamakan pembangunan sesuai dengan kenyataan dan juga harus membuktikan dulu sehingga itu bisa dimanfaatkan dan kami sebagai masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan berikutnya.(Kamarudin, Wiraswasta,17 September 2010, 14 : 45 WIB)

Selanjutnya dari ungkapan di atas dan beberapa hasil wawancara dengan responden diperoleh hasil penelitian tentang kegiatan tahap awal yakni penataan kawasan yang menyebabkan kurang efektif berkenaan dengan komunikasi yang dinilai cukup baik oleh masyarakat namun dengan syarat bahwa kebijakan harus jelas, akurat dan konsisten. Oleh karena itu perlu dibangun interaksi antara pemerintah dan juga pihak-pihak yang terkait.

Oleh karena itu, akibat dari kurang terlaksananya Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak yang telah direncanakan pada tahap awal ini hanya sebagian saja yang terlaksana dikarenakan interaksi dan komunikasi tidak terjalin dengan baik sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam menjalankan kegiatan tugas dan fungsi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dikarenakan kurang adanya koordinasi yang efektif dan efesien.

Penyebab kurang terlaksananya program Pemerintah dalam berdasarkan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak yang menimbulkan berbagai selain berkenaan dengan koordinasi dan komunikasi juga terkait faktor pendukung dan penghambat.

Dalam melaksanakan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia mengalami faktor pendukung antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Dukungan kebijakan daerah terhadap program pengembangan dapat dilihat dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2006-2011 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan terbentuknya landasan yang kuat menuju kabupaten siak sebagai pusat budaya melayu diriau yang di dukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju. Karena itu program pengembangan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat pentingnya peranan sektor tersebut sebagai salah satu basis ekonomi rakyat Kabupaten Siak. Adanya komitmen yang kuat dan kebijakan yang jelas dari Pemerintah Daerah merupakan faktor pendukung utama dalam rangka pembangunan Pariwisata. Pengembangan Pariwisata Agrowisata terkait langsung dengan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga perlu penanganan yang intensif dan proporsional.

2. Potensi Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Mempura khusunya Desa Sungai Mempura merupakan salah satu faktor pendukung program pengembangan kawasan. Potensi yang dimaksud adalah lahan yang cocok untuk pengembangan kawasan agrowisata.

Adanya lahan yang potensial untuk pengembangan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih baik. Peluang untuk menciptakan wilayah ini sebagai salah satu sentral objek wisata yang luas. Potensi tersebut didukung oleh kultur yang ada. Dengan memberikan pembinaan kepada mereka agar bersedia berpartisipasi dalam program pemerintah dari segi pariwisata tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Keuangan Daerah

Salah satu faktor penting program Pemerintah ini adalah tersedianya sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai semua proses pelaksanaan pengembangan itu sendiri. Dengan Otonomi daerah saat ini dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan program pembangunan dengan menggali sumber keuangannya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program pembangunan daerahnya.

Dari struktur APBD diketahui bahwa sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Siak secara umum masih sangat tergantung pada pembantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti dana bagi hasil pajak dan non pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah relatif sangat kecil.

2. Dukungan Aparatur dan Birokrasi Pemerintah

Dukungan aparatur dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan yakni dimulai dari sosialisasi program, penentuan lahan, dan berbagai program pengembangan lainnya. Kurangnya dukungan tersebut menyebabkan kurangnya dedikasi yang tinggi dari petugas pelaksana lapangan untuk memberikan motivasi pembinaan dan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan.

3. Kendala Struktural Dan Kultural

Kendala struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan kawasan agrowisata sungai mempura ini adalah rendahnya kemauan politik para anggota legislatif di DPRD untuk merealisasikan program pengembangan secara proporsional. Hal itu tercermin dari kecilnya proporsi anggaran yang disetujui dan alokasikan untuk pelaksanaan program tersebut. Kendala struktural ini tidak terlepas dari rendahnya pemahaman anggota legislatif tentang pentingnya program pengembangan kawasan agrowisata Mempura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Sementara hambatan bersifat kultural berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat yang cenderung tidak produktif.

4. Kendala Sosial Ekonomi Dan Keterbatasan SDM

Keterbatasan kondisi sosial ekonomi seperti umur, pendidikan dan pengalaman sangat berpengaruh pada program pengembangan ini. Hal ini menyulitkan penyampaian pesan inovasi baru dalam pelaksanaan kegiatan. Melihat tingkat pendidikan yang rendah maka pihak penyelenggara proyek perlu lebih mengintensifkan proses penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang lebih baik dan maju.

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai dalam penelitian yang dilakukan dilapangan, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain : (1) Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti bersumber dari SK Bupati No : 1 /HK/KPTS/2009 tentang Pembentukan Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara bebas terpimpin secara mendalam dan didukung sejumlah data maka dapat disimpulkan bahwa satu dari ketiga indikator yang telah ditetapkan dikarenakan rangkaian kegiatan yang menjadi patoakan terlaksananya tahap berikutnya sebagai kegiatan tahap awal dapat dikatakan kurang terlaksana ataupun dapat dikatakan gagal dalam mencapai target yang diinginkan pada tahun pertama atau tahap awal ini. (2) Dalam melaksanakan Tugas Dan Fungsi Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura Kabupaten Siak memiliki faktor pendukung dan penghambat program pengembangan tersebut antara lain : Faktor pendukung adalah dukungan kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2006-2011, potensi wilayah dan sumber daya alam. Sementara terkait dengan faktor penghambatnya adalah keterbatasan keuangan daerah, kendala struktural dan kultural, kendala sosial ekonomi dan keterbatasan SDM dan juga kurangnya dukungan aparatur dan birokrasi pemerintahan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Esmara, Hendra, 1986. Perencanaan Dan Pembangunan Di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta
- Hasibuan, Malayu, 1989. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Indriyati, 1999, Pengaruh Pengembangan Industri Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta.
- Kountor, Ronny, 2005. Metode Penelitian. Teruna Grafica, Jakarta.
- Nabolo, Muhamad, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rondinelli, Dennis A. 1996. Desentralisazation In Adeveloping Countries. World Bank Staff Working paper No. 51, Washington DC.
- Santosa, Budi, Priyo, 1993. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Representatif Kultur Dan Struktural. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Saragih, 2001. Kumpulan Pemikiran Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Edisi Milenium, PT Loji Grafika Sarana, Bogor.
- Sedarmayanti, 2004. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju, Bandung.
- Stoner, James, dan Carles Wankel, 1986. Management. Third edition. Prentice Hall.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D. Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, 1988. Penilaian Pelaksanaan Dan Pengembangan Karyawan. BPPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sulistiyani, 2004. Memahami Good Governance, Dalam Prespektif SDM. Gava Media, Jogjakarta.
- Suradinata, Ermaya, 1995. Kebijakan Pembangunan Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Prisma, Jakarta.
- Wasistiono, Dan Tahir, Irwan, 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV Fokusmedia, Jakarta.